

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Banyuwangi pada Oktober 2025 tercatat mengalami inflasi, masing-masing sebesar 0,22 persen dan 2,62 persen. Secara year on year (y-on-y), Banyuwangi juga mengalami inflasi sebesar 3,18 persen dengan IHK sebesar 110,13 lebih tinggi dari Jawa Timur dan Nasional dengan tingkat inflasi y on y sebesar 2,69 persen dan 2,86 persen. Inflasi y-on-y tersebut terjadi akibat kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, makanan, minuman dan tembakau, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m Oktober 2025 di Banyuwangi antara lain emas perhiasan, telur ayam ras, jeruk, salak, pisang, tongkol diawetkan, daging sapi, cumi-cumi, dan kontrak rumah. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y Oktober 2025 masih dipimpin oleh emas perhiasan, disusul beras, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, jeruk, telur ayam ras, minyak goreng, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan ikan tongkol.
- b. Pada November 2025, secara month to month (m-to-m), Kabupaten Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 110,21. Sementara itu, tingkat inflasi year to date (y-to-d) tercatat sebesar 2,69 persen. Secara year on year (y-on-y), Banyuwangi pada November 2025 mengalami inflasi sebesar 3,13 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya, dengan IHK meningkat dari 106,86 menjadi 110,21 serta lebih tinggi dengan tingkat inflasi Jawa Timur dan Nasional sebesar 2,63 persen dan 2,72 persen. Inflasi y-on-y tersebut terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman dan tembakau. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y bulan November 2025 masih dipimpin oleh emas perhiasan, disusul beras, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, jeruk, telur ayam ras, minyak goreng, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan daging ayam ras.
- c. Pada Desember 2025, secara month to month (m to m), Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 110,99. Inflasi ini menunjukkan adanya kenaikan harga secara umum dibandingkan bulan sebelumnya, sekaligus menutup tahun dengan inflasi year to date (y to d) sebesar 3,42 persen. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m to m di Banyuwangi terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas Cabai Rawit, Emas Perhiasan, Daging Ayam Ras, Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Tomat, Udang Basah, Minyak Goreng. Sementara itu, komoditas seperti Cabai Merah, Beras, Sawi Hijau, Kelapa, dan Ikan Tongkol memberikan andil deflasi sehingga menahan laju inflasi yang lebih tinggi. Pada Desember 2025, inflasi year on year (y on y) Banyuwangi tercatat sebesar 3,42 persen, lebih tinggi dibandingkan periode Desember tahun sebelumnya. Inflasi y on y tersebut terjadi karena kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, serta Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year on year (y on y) pada Desember 2025 masih dipimpin oleh Emas Perhiasan, kemudian disusul oleh Cabai Rawit, Beras, Daging Ayam Ras, Bahan Bakar Rumah Tangga, Jeruk, Minyak

Goreng, Bawang Merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Ikan Tongkol.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Triwulan IV 2025 ditandai dengan tren inflasi yang terus meningkat dan relatif konsisten. Pada Oktober 2025, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,22 persen, mencerminkan mulai menguatnya tekanan harga yang didorong oleh kenaikan harga komoditas pangan, perawatan pribadi, serta perumahan. Tekanan inflasi berlanjut pada November 2025 meskipun dengan laju yang lebih moderat, yakni inflasi m-to-m sebesar 0,07 persen, seiring masih berlanjutnya kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Puncak tekanan inflasi terjadi pada Desember 2025 dengan inflasi m-to-m yang meningkat signifikan sebesar 0,71 persen, dipicu oleh kenaikan permintaan masyarakat menjelang akhir tahun serta faktor musiman, terutama pada komoditas pangan.
- b. Pada Oktober 2025, tekanan inflasi terutama berasal dari kenaikan harga emas perhiasan, telur ayam ras, aneka buah (jeruk, salak), seiring meningkatnya permintaan dan penyesuaian harga pada sektor perumahan. Tekanan inflasi berlanjut pada November 2025 meskipun relatif terbatas, dengan sumbangan inflasi masih didominasi oleh emas perhiasan, beras, cabai merah dan tongkol. Selanjutnya, pada Desember 2025 inflasi meningkat signifikan, terutama dipicu oleh kenaikan harga cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, serta minyak goreng, yang berkaitan dengan peningkatan permintaan akhir tahun. Sementara itu, penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai merah, beras, dan ikan tongkol turut menahan laju inflasi agar tidak lebih tinggi.
- c. Secara tahunan, inflasi Kabupaten Banyuwangi pada akhir Triwulan IV 2025 tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional. Inflasi year on year mencapai 3,42 persen pada Desember 2025, melampaui inflasi Jawa Timur dan Nasional yang masih berada di bawahnya. Capaian inflasi tahunan tersebut tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional, sehingga menjadi sinyal terjaganya daya beli masyarakat Banyuwangi, meskipun tekanan harga meningkat menjelang akhir tahun akibat faktor musiman dan meningkatnya aktivitas ekonomi.
- d. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar sepanjang Triwulan IV 2025. Kelompok ini mencatatkan kenaikan harga tahunan yang signifikan, dengan komoditas utama emas perhiasan sebagai penyumbang inflasi y-on-y tertinggi secara konsisten sejak Oktober hingga Desember 2025. Tingginya kontribusi emas perhiasan mencerminkan masih kuatnya kemampuan konsumsi masyarakat, khususnya pada barang bernilai tinggi, yang umumnya meningkat pada periode akhir tahun dan menjelang kebutuhan sosial-budaya masyarakat.
- e. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga memberikan andil inflasi yang cukup besar dengan kontribusi y-on-y yang stabil selama Triwulan IV 2025. Kenaikan harga pada kelompok ini masih tergolong moderat dan wajar, mengingat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, serta adanya faktor cuaca yang memengaruhi pasokan beberapa komoditas hortikultura dan protein hewani. Secara umum, pola konsumsi pangan masyarakat Banyuwangi pada periode ini masih terjaga dan tidak menunjukkan gejala yang berlebihan.
- f. Dari sisi komoditas, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Triwulan IV 2025 didominasi oleh cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah,

ikan tongkol, minyak goreng, dan beras. Komoditas tersebut merupakan bahan pangan utama yang lekat dengan pola konsumsi masyarakat Banyuwangi. Meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, kondisi pasokan relatif aman karena Banyuwangi merupakan salah satu daerah produsen pangan dan perikanan. Hal ini memberikan dampak positif bagi petani dan nelayan, sekaligus menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan peningkatan pendapatan pelaku usaha. Selain itu, dominannya komoditas nonpangan seperti emas perhiasan dalam inflasi y-on-y juga memperkuat indikasi bahwa daya beli masyarakat Banyuwangi pada Triwulan IV 2025 tetap terjaga dengan baik.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menyelenggarakan kegiatan Operasi Pasar pada bulan November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan selama enam hari, mulai tanggal 9 hingga 14 November 2025, dan tersebar di berbagai kecamatan sebagai upaya mendekatkan akses pangan murah kepada masyarakat. Operasi pasar dimulai sejak pukul 06.00 WIB, dengan jam pelayanan kepada masyarakat pada pukul 08.30 WIB hingga selesai, menyesuaikan kondisi lapangan dan antusiasme warga. Lokasi pelaksanaan meliputi sejumlah titik strategis, yakni CFD Taman Makam Pahlawan, Terminal Jajag (Kecamatan Gambiran), Balai Desa Bayu (Kecamatan Songgon), Pasar Gendoh (Kecamatan Sempu), Pasar Glenmore, Kantor Camat Cluring, serta Pasar Muncar, sehingga menjangkau wilayah perkotaan maupun sentra permukiman dan pasar rakyat. Adapun komoditas yang disediakan dalam kegiatan ini meliputi beras SPHP dengan harga Rp57.500 per 5 kg dan gula pasir seharga Rp17.500 per kilogram, yang dijual di bawah harga pasar guna menekan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat. Ketersediaan komoditas tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, khususnya menjelang periode peningkatan permintaan. Pelaksanaan operasi pasar ini didukung oleh berbagai pihak, antara lain Perum Bulog, Pertamina, Hiswana Migas, serta pelaku usaha terkait, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Dalam rangka menjaga stabilitas harga, Bupati Banyuwangi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banyuwangi secara aktif turun langsung ke lapangan selama periode Oktober hingga Desember 2025. Kegiatan ini difokuskan pada pemantauan harga dan pasokan bahan pokok di 14 pasar daerah, sekaligus dirangkai dengan pelaksanaan Gerakan Belanja “Cantik” di pasar rakyat dan UMKM, yang telah menjadi program berkelanjutan sejak tahun 2021. Pada bulan Oktober 2025, Gerakan Belanja Cantik dilaksanakan bertepatan dengan momentum tanggal kembar 10.10, melibatkan ribuan ASN serta berbagai komunitas masyarakat. Dalam kegiatan ini, Bupati bersama TPID melakukan monitoring harga sekaligus mengajak ASN berbelanja langsung di pasar tradisional dan pelaku UMKM. Hasil belanja tidak hanya berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal, tetapi juga didonasikan kepada masyarakat kurang mampu hingga anak stunting, sehingga memberikan manfaat ganda baik bagi pedagang maupun kelompok rentan. Selanjutnya pada bulan November 2025, Gerakan Belanja Cantik kembali digelar pada momentum 11.11, bersamaan dengan meningkatnya

perhatian terhadap isu inflasi dan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Pada kesempatan ini, kegiatan belanja ASN di pasar rakyat dan UMKM juga dirangkai dengan pemantauan distribusi bahan pokok serta operasi pasar. Hasil belanja kemudian disalurkan kepada masyarakat sasaran, memperkuat aspek solidaritas sosial sekaligus membantu menjaga keterjangkauan harga pangan di tingkat rumah tangga. Memasuki bulan Desember 2025, Gerakan Belanja Cantik pada momentum 12.12 menjadi penutup rangkaian kegiatan akhir tahun. Bupati dan TPID kembali memastikan pasokan bahan pokok tetap aman menjelang Natal dan Tahun Baru, sambil mendorong ASN dan komunitas untuk berbelanja produk lokal. Kegiatan ini menjadi simbol konsistensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menggabungkan kebijakan pengendalian inflasi dengan aksi sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Secara keseluruhan, Gerakan Belanja Cantik yang dilaksanakan setiap bulan kembar tidak hanya menggerakkan perekonomian lokal, tetapi juga menciptakan kepedulian kolektif antara pemerintah, ASN, pedagang pasar, pelaku UMKM, dan masyarakat penerima manfaat. Ribuan ASN dan komunitas yang terlibat mampu mencatat total transaksi berkisar Rp700 juta hingga Rp900 juta setiap bulannya, memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan usaha rakyat serta membantu masyarakat yang membutuhkan.

- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya dalam mendukung keterjangkauan harga dan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dilaksanakan secara tertib, legal, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat peletakan batu pertama pembangunan Kopdes Merah Putih di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi. Bupati Ipuk menekankan bahwa percepatan pembangunan fisik koperasi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga memastikan kepastian hukum atas status lahan serta tata kelola koperasi yang sesuai prosedur. Langkah ini menjadi fondasi penting agar Kopdes Merah Putih dapat beroperasi dalam jangka panjang sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan harga di tingkat desa dan kelurahan. Melalui peran koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang kebutuhan pokok, memperkuat posisi tawar masyarakat, serta menyediakan barang dengan margin wajar. Dengan demikian, koperasi dapat berkontribusi nyata dalam menjaga keterjangkauan harga, terutama bagi rumah tangga di tingkat akar rumput. Selain itu, penguatan manajemen dan tata kelola internal koperasi menjadi kunci agar Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana distribusi dan stabilisasi harga. Dalam kondisi tertentu, koperasi juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pangan murah, operasi pasar, maupun distribusi komoditas strategis. Dukungan lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI dalam proses verifikasi lahan yang bersih dan bebas sengketa, semakin memperkuat kesiapan Kopdes Merah Putih untuk beroperasi secara optimal. Dengan lahan yang clean and clear serta tata kelola yang baik, koperasi diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam peningkatan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Melalui pembangunan Kopdes Merah Putih yang tertib, terencana, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan keterjangkauan harga tidak hanya dilakukan melalui intervensi jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat sebagai fondasi stabilitas harga jangka panjang.
- d. Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop), dan Bulog di kawasan Car Free Day (CFD) Taman Makam Pahlawan Kabupaten Banyuwangi pada November 2025 merupakan salah satu

langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, karena rantai distribusi dipangkas dan melibatkan langsung produsen, distributor, serta pelaku usaha daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk menekan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah potensi fluktuasi harga pangan. Pelaksanaan GPM di ruang publik seperti CFD juga memudahkan akses masyarakat terhadap pangan murah dan berkualitas, sehingga prinsip harga terjangkau, pasokan tersedia, dan distribusi lancar dapat berjalan secara simultan. Dengan demikian, GPM tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi, tetapi juga instrumen pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga komoditas pangan strategis. Sinergi antara Pemkab Banyuwangi, Diskop, serta pelaku usaha dalam Gerakan Pangan Murah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat dijangkau oleh seluruh lapisan, khususnya menjelang periode rawan kenaikan harga.

- e. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mengoptimalkan pengendalian inflasi daerah melalui penguatan ketahanan pangan yang berdampak langsung pada keterjangkauan harga bagi masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan Warm System sebagai inovasi pengelolaan air irigasi. Inovasi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 ini dirancang untuk memastikan ketersediaan air irigasi yang berkelanjutan, sehingga produksi pangan dapat berjalan stabil sepanjang musim tanam. Melalui Warm System, juru pengairan dan penjaga pintu air mencatat rencana tanam, curah hujan, serta debit air setiap 10 hari. Data tersebut diolah secara otomatis dan dapat dipantau secara real time melalui gawai. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi lebih dini terhadap potensi kekurangan air, sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan sebelum berdampak pada penurunan produksi. Stabilitas pasokan hasil pertanian yang terjaga melalui pengelolaan irigasi yang presisi berkontribusi langsung terhadap kestabilan dan keterjangkauan harga pangan. Dengan produksi yang terencana dan risiko gagal panen yang lebih rendah, fluktuasi harga akibat kelangkaan pasokan dapat ditekan. Hal ini sangat penting mengingat komoditas pangan merupakan penyumbang utama inflasi daerah. Selain penerapan teknologi informasi, Pemkab Banyuwangi juga aktif membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi. Upaya ini semakin memperkuat kapasitas produksi pertanian daerah, menjaga kesinambungan pasokan di pasar, dan pada akhirnya memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dengan demikian, Warm System tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi.
- f. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan mendorong peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen distribusi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Keberadaan koperasi ini menjadi salah satu upaya nyata pemerintah daerah dalam memastikan keterjangkauan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Salah satu koperasi yang telah beroperasi aktif adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, yang bahkan mendapat kunjungan langsung dari Maliki, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI. Kunjungan tersebut bertepatan dengan agenda pemerintah pusat terkait digitalisasi bantuan sosial, sekaligus menjadi pengakuan atas kemajuan dan tata kelola koperasi yang dinilai sudah cukup baik. KKMP Tukangkayu dinilai unggul karena menghadirkan

layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain layanan simpan pinjam, koperasi ini mengelola gerai sembako yang menyerupai minimarket, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari. Saat ini, koperasi tersebut telah memiliki tiga gerai, yakni gerai sembako, gerai simpan pinjam berbasis voucher belanja, serta gerai percetakan. Gerai sembako KKMP Tukangkayu menyediakan berbagai kebutuhan fast moving, baik pangan maupun nonpangan, dengan kemitraan strategis bersama Bulog untuk bahan pokok dan Pertamina Patra Niaga untuk distribusi gas elpiji 3 kg. Pola kemitraan ini memastikan pasokan terjaga dan harga lebih terkendali. Salah satu keunggulan utama Koperasi Merah Putih adalah harga sembako dan kebutuhan pokok yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga mampu menekan potensi lonjakan harga di tingkat konsumen. Selain menawarkan harga yang lebih murah, koperasi juga memberikan cash back belanja melalui pembayaran QRIS bagi anggota yang memiliki rekening BTN, yang saat ini telah mencakup 217 KKMP/KDMP di Banyuwangi. Skema ini tidak hanya mendorong transaksi non-tunai dan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan tambahan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui penguatan Koperasi Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun ekosistem distribusi yang lebih efisien dan berkeadilan. Upaya ini berkontribusi langsung terhadap stabilisasi harga, keterjangkauan kebutuhan pokok, dan pengendalian inflasi daerah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui pengamanan ketersediaan pasokan, khususnya pada sektor pertanian dan UMKM perdesaan. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa satu unit kendaraan truk kepada Koperasi Mendo Sampurna di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Hj. RR Nanin Oktaviantie, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banyuwangi, Dwi Yanto, ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperlancar distribusi hasil pertanian anggota koperasi. Dengan dukungan sarana angkut yang memadai, arus distribusi komoditas pertanian dari sentra produksi ke pasar dapat berjalan lebih efisien, sehingga ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga dan risiko kelangkaan dapat ditekan. Penguatan kelembagaan koperasi melalui penyediaan sarana distribusi juga berperan penting dalam menjaga kesinambungan produksi dan pasokan. Koperasi berfungsi sebagai simpul penghubung antara petani dan pasar, sehingga hasil pertanian dapat terserap dengan baik dan tidak terhambat oleh keterbatasan logistik. Kondisi ini mendukung stabilitas pasokan bahan pangan yang menjadi faktor utama dalam pengendalian inflasi daerah. Selain sektor pertanian, Pemkab Banyuwangi juga mendorong keberlanjutan pasokan barang melalui penguatan UMKM perdesaan. Hal ini tercermin dari kunjungan dan pembelian produk UMKM oleh Kepala Diskopumdag di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu. Dukungan terhadap pelaku usaha mikro, khususnya pengrajin dan produsen olahan lokal, bertujuan menjaga ketersediaan produk lokal di pasar serta memperkuat rantai pasok ekonomi daerah. Melalui sinergi penguatan koperasi, dukungan sarana distribusi pertanian, dan pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya memastikan pasokan barang dan pangan tetap lancar. Upaya ini menjadi fondasi penting dalam pengendalian inflasi daerah dari sisi ketersediaan pasokan, sekaligus mendorong ketahanan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat Banyuwangi.

- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui pengamanan ketersediaan pasokan, salah satunya dengan mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai wilayah. Koperasi ini berperan strategis sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok di tingkat desa dan kelurahan, sehingga pasokan barang dapat terjaga lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu koperasi yang telah beroperasi aktif adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi. Keberadaan koperasi ini bahkan mendapat perhatian pemerintah pusat melalui kunjungan Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, yang menilai KKMP Tukangkayu telah dikelola secara maju dan mampu menjalankan fungsi pelayanan ekonomi masyarakat dengan baik. KKMP Tukangkayu mengelola tiga gerai usaha, yakni gerai sembako, gerai simpan pinjam berbasis voucher belanja, serta gerai percetakan. Khusus pada gerai sembako, koperasi menyediakan berbagai kebutuhan fast moving baik pangan maupun nonpangan. Untuk menjamin keberlanjutan pasokan, koperasi menjalin kemitraan dengan Bulog dalam penyediaan bahan pokok serta Pertamina Patra Niaga untuk distribusi gas elpiji 3 kilogram. Pola kemitraan ini memastikan stok komoditas strategis tetap tersedia dan tidak terganggu. Dengan terjaganya kelancaran pasokan bahan pokok dan energi rumah tangga melalui jaringan koperasi, potensi kelangkaan barang yang dapat memicu gejolak harga dapat ditekan. Keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai perpanjangan tangan distribusi pemerintah di tingkat akar rumput menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pasokan barang kebutuhan pokok. Melalui penguatan kelembagaan koperasi dan sinergi dengan BUMN penyedia pangan dan energi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi daerah dari sisi ketersediaan pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.
- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan ketersediaan pasokan pangan, salah satunya dengan menggelar tanam jagung serentak bersama Polresta Banyuwangi pada 8 Oktober di areal persawahan Lingkungan Wonosari, Kelurahan Sobo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanam jagung serentak kuartal IV secara nasional yang dipimpin Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Kapolri, sebagai upaya mendorong swasembada pangan. Di Banyuwangi, penanaman jagung dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare di Kelurahan Sobo dan diperluas hingga sekitar 505 hektare yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI, Bulog, serta petani, sehingga memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah. Upaya peningkatan produksi ini telah menunjukkan hasil positif. Sepanjang periode Januari-September 2025, produksi jagung Banyuwangi mencapai 199.878 ton, meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kebutuhan jagung daerah pada periode tersebut hanya mencapai 52.496 ton, sehingga Banyuwangi masih mengalami surplus sekitar 147.382 ton. Kondisi surplus ini menjadi penopang penting dalam menjaga ketersediaan pasokan jagung di pasar. Selain peningkatan produksi, Pemkab Banyuwangi bersama Polresta juga mendorong percepatan pemanfaatan lahan, termasuk di kawasan perhutanan sosial dengan target 650 hektare. Pendampingan oleh Bhabinkamtibmas kepada petani di tingkat kecamatan dan desa memastikan proses tanam berjalan optimal dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya luas panen dan produksi jagung, pasokan komoditas pangan strategis dapat terjaga, sehingga potensi kelangkaan yang memicu gejolak harga dapat ditekan. Melalui program tanam jagung serentak ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya dalam pengendalian inflasi daerah

dari sisi ketersediaan pasokan, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pedesaan.

- d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui pengamanan ketersediaan pasokan pangan, salah satunya dengan mendorong petani untuk memanfaatkan pupuk organik secara bertahap. Langkah ini diambil di tengah tingginya penyerapan pupuk bersubsidi hingga Agustus, di mana pupuk urea telah terserap 60,89 persen dan pupuk NPK 71,10 persen, yang berpotensi memicu kendala pasokan pada musim tanam berikutnya. Melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), pemerintah daerah mengarahkan petani untuk tidak sepenuhnya bergantung pada pupuk kimia bersubsidi. Peralihan ke pupuk organik sejalan dengan kebijakan pertanian berkelanjutan yang bertujuan menjaga kesinambungan produksi pertanian di tengah keterbatasan kuota pupuk bersubsidi yang cenderung menurun setiap tahun. Sebagai bentuk dukungan konkret, Dispertan Banyuwangi menyiapkan bantuan 130 ton pupuk organik serta benih padi sebagai stimulus bagi kelompok tani. Bantuan ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan dan memastikan proses tanam tetap berjalan optimal, sehingga pasokan hasil pertanian dapat terjaga secara berkelanjutan. Selain memperbaiki struktur tanah dalam jangka panjang, penggunaan pupuk organik juga membantu menekan risiko gangguan produksi akibat keterbatasan pupuk kimia. Dengan produksi yang lebih stabil dan berkelanjutan, potensi penurunan pasokan pangan yang dapat memicu gejolak harga dapat ditekan. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap aman, sekaligus membangun sistem pertanian yang lebih tangguh. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah dari sisi ketersediaan pasokan, demi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Banyuwangi.
- e. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) terus memperkuat pengendalian inflasi daerah dengan menjaga ketersediaan pasokan komoditas peternakan, khususnya dalam menghadapi masa pancaroba. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan menjadi periode krusial yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan ternak dan berdampak pada penurunan produksi daging, telur, maupun susu. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Dispertan Banyuwangi mengintensifkan edukasi dan pendampingan lapangan kepada para peternak mengenai langkah-langkah pencegahan dini penyakit ternak. Peternak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan suhu ekstrem yang kerap memicu munculnya berbagai penyakit, termasuk melalui penerapan kebersihan kandang, pengelolaan pakan yang baik, serta pemberian vitamin dan vaksin secara rutin. Pada masa peralihan cuaca, ternak rentan mengalami kondisi “aratan”, yakni stres akibat perubahan suhu mendadak yang menyebabkan daya tahan tubuh menurun. Untuk itu, peternak diedukasi agar mampu mengenali tanda-tanda awal ternak sakit sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Selain edukasi, Dispertan juga menyiagakan petugas lapangan untuk melakukan pemantauan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terus digenjut agar seluruh ternak terlindungi sebelum musim hujan tiba. Pengawasan juga diperluas ke sektor unggas dengan mendorong peternak menjaga sirkulasi udara kandang, kebersihan lingkungan, serta disiplin dalam pemberian nutrisi dan jadwal vaksinasi. Melalui langkah antisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mencegah penurunan populasi dan produktivitas ternak yang dapat mengganggu pasokan protein hewani di pasar. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah dari sisi ketersediaan pasokan, dengan memastikan pasokan daging, telur, dan produk peternakan tetap aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
- f. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah

melalui peningkatan ketersediaan pasokan pangan, khususnya komoditas beras sebagai penyumbang utama inflasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan PT Pupuk Kaltim dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Melalui penerapan Program Agrosolution, produktivitas padi di Banyuwangi berhasil ditingkatkan dari sebelumnya 6-7 ton per hektare menjadi 8 ton per hektare. Keberhasilan ini ditunjukkan dalam panen Demonstration Plot (Demplot) padi di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, yang melibatkan petani setempat dengan pendampingan intensif dan penerapan teknologi pertanian modern. Peningkatan produktivitas ini turut didukung oleh bertambahnya luas tanam padi di Banyuwangi yang pada tahun 2025 mencapai 121.319 hektare, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, total produksi padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 806.164 ton Gabah Kering Panen (GKP). Berdasarkan neraca pangan Januari-September 2025, Banyuwangi bahkan mencatat surplus beras sekitar 307.244 ton, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Surplus produksi ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga ketersediaan pasokan beras di daerah, sekaligus memperkuat cadangan pangan. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya serapan beras oleh Bulog Banyuwangi, yang mencapai 52.162 ton pada tahun 2025. Penyerapan ini memastikan hasil panen petani terserap optimal sekaligus menjaga stok beras tetap aman. Ketersediaan pasokan juga didukung oleh kebijakan pemerintah terkait jaminan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, baik melalui kecukupan pupuk bersubsidi maupun penurunan harga pupuk subsidi. Kebijakan ini menjaga keberlanjutan produksi pertanian sehingga pasokan pangan dapat terjaga secara konsisten. Melalui sinergi pemerintah daerah, BUMN, TNI-Polri, Bulog, dan petani, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil memperkuat rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir. Upaya peningkatan produksi dan penguatan cadangan ini menjadi bagian penting dari strategi pengendalian inflasi daerah dari sisi ketersediaan pasokan, guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi.

- g. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui upaya peningkatan ketersediaan pasokan pangan strategis, salah satunya komoditas kedelai. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan kedelai varietas unggul Garuda Merah Putih yang memiliki produktivitas tinggi dan masa tanam lebih singkat dibandingkan kedelai lokal. Pengembangan kedelai varietas Garuda Merah Putih dilaksanakan di Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, melalui kolaborasi antara petani yang tergabung dalam Gapoktanhut Purwo Maju Sejahtera, Pangkalan TNI AL Banyuwangi, serta dukungan Kementerian Pertanian. Varietas ini memiliki potensi produktivitas hingga 4 ton per hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan produktivitas kedelai lokal yang rata-rata berkisar 1,5-2 ton per hektare, sehingga mampu meningkatkan pasokan kedelai secara signifikan. Pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan juga mendorong perluasan area tanam dari tahap awal seluas 1 hektare menjadi hingga 60 hektare, dengan memanfaatkan hasil panen sebagai benih untuk keberlanjutan produksi. Langkah ini diharapkan dapat menjamin kecukupan pasokan kedelai di daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. Peningkatan ketersediaan pasokan kedelai menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi, mengingat kedelai merupakan bahan baku utama berbagai kebutuhan pangan masyarakat seperti tahu dan tempe. Dengan pasokan yang terjaga dan berkelanjutan, potensi tekanan harga akibat kelangkaan pasokan dapat diminimalkan, sehingga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, petani, TNI AL, serta pemerintah pusat, Kabupaten Banyuwangi optimistis dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan melalui pilar ketersediaan pasokan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah

h.

melalui pengamanan ketersediaan pasokan pangan strategis, khususnya komoditas beras, menjelang periode rawan inflasi Natal dan Tahun Baru (Nataru). Melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan), pemerintah daerah secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi lintas sektor guna memastikan kecukupan stok beras di tingkat produsen, penggilingan, hingga cadangan pemerintah. Berdasarkan hasil proyeksi neraca pangan bulan Desember 2025, Banyuwangi diperkirakan mengalami surplus beras sebesar 35.677,19 ton, dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 13.790,64 ton dan produksi mencapai 49.467,83 ton. Kondisi surplus ini menunjukkan kuatnya pasokan beras daerah sehingga mampu meredam potensi tekanan harga akibat peningkatan permintaan menjelang Nataru. Untuk memastikan stabilitas pasokan berjalan optimal, Pemkab Banyuwangi melakukan pemantauan langsung ke sentra penggilingan padi serta berkoordinasi intensif dengan Bulog Cabang Banyuwangi. Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog tercatat sebesar 97.500 ton, yang berada pada level aman dan siap dimobilisasi untuk kebutuhan penyaluran reguler, operasi pasar murah, maupunantisipasi gejolak harga. Selain penguatan pasokan, pemerintah daerah juga mendukung pelaksanaan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada lebih dari 100 ribu Penerima Bantuan Pangan (PBP). Program ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan rumah tangga masyarakat berpendapatan rendah, tetapi juga berperan dalam menahan lonjakan permintaan di pasar terbuka sehingga stabilitas harga beras tetap terjaga. Sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta pelaku usaha penggilingan padi memastikan ketersediaan stok gabah dan beras tetap mencukupi hingga menjelang panen raya padi pada Maret-April 2026. Dengan terjaminnya ketersediaan pasokan beras yang memadai dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi optimistis mampu menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah, khususnya pada kelompok volatile food, melalui pilar ketersediaan pasokan (4K).

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui upaya menjaga kelancaran distribusi, khususnya pada sektor pertanian. Salah satu langkah konkret dilakukan dengan normalisasi Dam Garit di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh, sebagai bentuk antisipasi banjir dan gangguan aliran air menjelang musim penghujan. Normalisasi dilakukan dengan mengeruk timbunan sedimentasi setinggi sekitar tiga meter di dasar bendungan yang mencapai volume kurang lebih 8.268 meter kubik. Penanganan ini dilakukan secara intensif sejak 2 Oktober dan ditargetkan rampung dalam sepuluh hari kerja. Langkah tersebut bertujuan memastikan aliran air sungai tetap lancar, sehingga tidak terjadi luapan yang dapat mengganggu infrastruktur dan aktivitas pertanian. Dam Garit memiliki peran strategis karena mengairi sekitar 475 hektare lahan sawah yang tersebar di enam desa. Dengan aliran irigasi yang kembali normal, proses distribusi air ke petak-petak sawah petani dapat berjalan optimal. Kelancaran distribusi air irigasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian, sehingga pasokan hasil panen ke pasar tidak terganggu. Melalui normalisasi bendungan dan saluran irigasi secara berkala, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memastikan rantai distribusi dari hulu ke hilir tetap berjalan lancar, mulai dari distribusi air sebagai input produksi hingga distribusi hasil pertanian. Upaya ini berperan dalam mencegah potensi gagal tanam atau penurunan produksi akibat gangguan irigasi, yang pada akhirnya dapat memicu kelangkaan dan tekanan harga. Dengan demikian, normalisasi Dam Garit tidak hanya menjadi langkah

mitigasi bencana, tetapi juga bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah melalui kelancaran distribusi, guna menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di Kabupaten Banyuwangi.

- b. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui upaya menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah perkotaan Banyuwangi pada 17 November 2025 sempat menyebabkan luapan di sejumlah sungai utama dan genangan di ruas jalan serta permukiman warga. Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas logistik dan distribusi kebutuhan pokok apabila tidak ditangani secara cepat. Merespons situasi tersebut, Pemkab Banyuwangi bergerak cepat melalui penanganan terpadu lintas sektor yang melibatkan BPBD, Dinas PU Pengairan, TNI, dan Polri. Sejumlah langkah segera dilakukan, seperti pengoperasian pintu air sesuai prosedur, pengerahan mesin pompa air portable berkapasitas 140 meter kubik per jam, serta pembersihan material yang menyumbat aliran sungai dan bendungan. Upaya ini bertujuan mempercepat surutnya genangan sehingga akses jalan dan jalur distribusi kembali normal. Selain itu, petugas gabungan juga melakukan penanganan dampak banjir di kawasan permukiman dan titik-titik rawan lainnya, termasuk membersihkan genangan, mengevakuasi warga, serta menangani pohon tumbang dan kepadatan lalu lintas. Langkah cepat tersebut memastikan aktivitas transportasi dan mobilitas barang tidak terganggu terlalu lama, sehingga pasokan kebutuhan masyarakat tetap lancar. Pemkab Banyuwangi juga melakukan pemantauan berkelanjutan dan pembersihan DAM dari material bawaan banjir sebagai langkah antisipasi lanjutan. Upaya ini penting untuk mencegah terulangnya luapan air yang dapat menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui respons cepat dan koordinasi lintas instansi dalam penanganan banjir, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menjaga kelancaran distribusi sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Dengan memastikan jalur transportasi dan distribusi tetap berfungsi, potensi gangguan pasokan dan tekanan harga akibat hambatan distribusi dapat ditekan.
- c. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Kementerian Perhubungan, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan penyeberangan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pengendalian inflasi daerah, mengingat Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu simpul logistik utama yang menghubungkan Jawa dan Bali. Melalui rapat koordinasi lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah menyusun berbagai skema antisipasi lonjakan arus kendaraan selama periode Nataru. Pengaturan ini dilakukan agar arus lalu lintas dan distribusi logistik tetap berjalan, meskipun terjadi peningkatan signifikan volume kendaraan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pengalihan angkutan barang tujuan Lembar melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo, guna mengurangi kepadatan di Pelabuhan Ketapang dan mencegah terhambatnya distribusi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyiapkan dukungan di lapangan melalui penguatan layanan publik, penempatan personel pengamanan, serta koordinasi intensif dengan kepolisian dan otoritas pelabuhan. Rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus kendaraan dilakukan untuk memastikan jalur distribusi tetap lancar dan tidak terganggu kemacetan berkepanjangan. Di sisi operasional, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang menyiapkan tiga skenario pola operasi kapal sesuai tingkat kepadatan, dengan mengerahkan hingga 54 kapal dan menyesuaikan jumlah perjalanan harian. Kesiapan dermaga, buffer zone, serta peningkatan kapasitas layanan penyeberangan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran arus kendaraan dan logistik selama periode puncak. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah,

BUMN, dan aparat keamanan, Pemkab Banyuwangi berupaya memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa tetap terjaga selama Nataru. Upaya ini penting untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu kenaikan harga, sehingga menjadi bagian integral dari strategi pengendalian inflasi daerah melalui kelancaran distribusi di Kabupaten Banyuwangi.

- d. Kecamatan Muncar merupakan salah satu sentra utama perikanan tangkap dan industri olahan ikan di Kabupaten Banyuwangi. Wilayah ini berperan strategis dalam memasok ikan segar dan produk olahan ikan ke pasar lokal maupun antar daerah. Karena itu, banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Kedungrejo berpotensi mengganggu kelancaran distribusi komoditas perikanan yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas pasokan dan harga pangan. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bergerak cepat melalui penanganan terpadu dengan melibatkan BPBD, Dinas PU Pengairan, dan relawan bencana. Pembersihan sumbatan sungai dan drainase yang menyebabkan banjir segera dilakukan agar genangan cepat surut dan akses jalan menuju sentra produksi perikanan, pelabuhan, serta jalur distribusi ikan kembali normal. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menginstruksikan percepatan perbaikan jalan desa dan akses utama warga yang rusak akibat banjir. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan aktivitas nelayan, pengolahan ikan, dan distribusi hasil perikanan tidak terhambat. Kelancaran transportasi dari Muncar ke pasar dan pusat distribusi sangat menentukan kontinuitas pasokan ikan dan produk olahan ikan di Banyuwangi. Dengan memastikan jalur distribusi dari sentra perikanan tetap berfungsi, Pemkab Banyuwangi berupaya mencegah keterlambatan distribusi yang dapat menyebabkan penurunan kualitas ikan, kelangkaan pasokan, dan gejolak harga. Penanganan banjir yang cepat dan pemulihan infrastruktur ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah melalui kelancaran distribusi, khususnya untuk komoditas perikanan yang memiliki kontribusi penting terhadap konsumsi masyarakat. Melalui langkah responsif dan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjaga agar rantai pasok perikanan di Muncar tetap berjalan, sehingga stabilitas pasokan dan harga ikan dapat dipertahankan meskipun di tengah kondisi cuaca ekstrem.

4. Komunikasi Efektif

- a. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui komunikasi yang efektif dan langsung menyentuh masyarakat, salah satunya melalui Program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Program yang digulirkan sejak 2021 ini menjadi sarana strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah tersampaikan dan dijalankan secara tepat sasaran. Melalui Bunga Desa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turun langsung ke desa-desa untuk menghadirkan berbagai layanan publik, sekaligus berdialog dengan warga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Hingga Desember 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 110 desa, memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi lapangan secara langsung terkait kondisi ekonomi masyarakat, termasuk persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga dan daya beli. Komunikasi efektif terwujud melalui dialog terbuka dan penyerapan aspirasi masyarakat, di mana berbagai permasalahan desa dapat diidentifikasi sejak dini dan dicarikan solusi secara bersama. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat menyampaikan kebijakan, program bantuan sosial, dukungan UMKM, serta layanan publik secara jelas dan transparan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan tidak terjadi kesenjangan informasi. Selain itu, kehadiran berbagai layanan administrasi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pendampingan

UMKM dalam satu lokasi memperkuat efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Informasi mengenai program bantuan, perizinan usaha, pengembangan UMKM, dan pemanfaatan potensi desa disampaikan secara langsung, sehingga pelaku usaha dan masyarakat desa dapat merespons dengan cepat dan tepat. Dengan komunikasi yang terbangun secara intensif dan berkelanjutan melalui Program Bunga Desa, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu mengelola ekspektasi masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan program pengendalian inflasi berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan komunikasi langsung ini menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan.

- b. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui komunikasi efektif dan koordinasi lintas sektor. Hal ini tercermin dalam rapat koordinasi Operasi Lilin Semeru yang melibatkan Polresta Banyuwangi, Pemkab, TNI/Polri, tokoh agama, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah secara terbuka menyampaikan proyeksi lonjakan wisatawan dan aktivitas masyarakat selama Nataru, sekaligus menyamakan persepsi antarinstansi mengenai langkah-langkah pengamanan, pelayanan publik, dan antisipasi risiko. Komunikasi yang terstruktur dan kolaboratif ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya kolaborasi dan penyampaian informasi yang jelas kepada seluruh stakeholder agar perayaan Nataru berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Dengan adanya kesepahaman bersama, pemerintah daerah dapat memastikan kelancaran aktivitas masyarakat dan wisatawan, sehingga distribusi barang dan jasa tetap berjalan normal tanpa gangguan yang berpotensi memicu kenaikan harga. Penyelenggaraan Operasi Lilin Semeru dengan pendirian pos pengamanan dan pos pelayanan di berbagai titik strategis juga menjadi bagian dari komunikasi pelayanan publik yang efektif. Keberadaan pos-pos tersebut memudahkan penyampaian informasi, penanganan cepat di lapangan, serta membangun rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini mendorong aktivitas ekonomi tetap berjalan stabil selama masa libur panjang. Melalui komunikasi yang intensif, koordinasi lintas sektor, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi selama periode Nataru, sehingga tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan dan mobilitas masyarakat dapat dikendalikan secara lebih efektif.
- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui komunikasi efektif hingga ke tingkat desa, salah satunya melalui forum Gesah Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dengan arah kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menekankan pentingnya peran BPD sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa. Dengan alokasi dana desa yang besar serta dinamika kebijakan fiskal, termasuk pengurangan dana transfer pusat ke daerah, BPD diharapkan mampu menyampaikan informasi kebijakan secara jelas dan utuh kepada masyarakat. Komunikasi yang transparan dan mudah dipahami ini penting untuk menjaga ekspektasi masyarakat serta mencegah gejolak sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu tekanan inflasi di tingkat lokal. Melalui penyelarasan kebijakan desa dan daerah, pemerintah daerah dapat memastikan program-program strategis seperti ketahanan pangan, penguatan BUMDes, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan selaras dan tepat sasaran. Penyamaan persepsi ini mendukung kelancaran pelaksanaan program

ekonomi desa, sehingga produksi, distribusi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di desa tetap terjaga. Forum Gesah Desa juga menjadi sarana dialog dua arah antara Pemkab dan BPD untuk membahas efisiensi anggaran serta prioritas pembangunan. Dengan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, potensi miskomunikasi kebijakan dapat diminimalkan, dan dukungan masyarakat terhadap program pemerintah dapat diperkuat. Melalui penguatan komunikasi efektif antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat, Pemkab Banyuwangi membangun fondasi pengendalian inflasi yang inklusif. Kebijakan yang dipahami bersama dan dilaksanakan secara selaras hingga tingkat desa akan membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan fiskal dan ekonomi.

- d. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, salah satunya melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Jumat, 24 Oktober 2025, di Ballroom Hotel Kokoon Banyuwangi. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan strategis, termasuk Bank Indonesia Jember, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Mengusung tema “Memperkuat Kolaborasi Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”, HLM TPID menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, berbagi informasi terkini, serta menyusun langkah antisipatif terhadap potensi tekanan inflasi di daerah. Komunikasi lintas sektor yang intensif ini penting agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dirumuskan secara terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Melalui forum ini, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan stakeholder terkait dapat menyampaikan perkembangan harga, dinamika pasokan dan distribusi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan secara terbuka. Alur komunikasi yang jelas dan terstruktur memungkinkan pemerintah daerah mengambil keputusan kebijakan yang responsif sekaligus menyampaikan pesan yang konsisten kepada masyarakat, sehingga ekspektasi inflasi tetap terjaga. Selain sebagai sarana koordinasi internal, HLM TPID juga memperkuat komunikasi kebijakan kepada publik. Sinergi yang terbangun memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi baik melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, maupun stabilisasi harga dipahami sebagai upaya bersama untuk melindungi daya beli masyarakat. Dengan mengedepankan komunikasi yang efektif dan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pengendalian inflasi tidak hanya dipandang sebagai tugas teknis, tetapi sebagai proses bersama yang membutuhkan keterbukaan informasi, kesamaan langkah, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- e. Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dengan melibatkan para Petugas Monitoring Harga dan Petugas Monitoring Perdagangan Antar Daerah dan Antar Pulau. Kegiatan survey harga juga melibatkan BPS Banyuwangi guna sinkronisasi harga yang ada di pasaran.
- f. Menginformasikan data harian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya juga disampaikan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan sarana televisi di pasar-pasar tradisional serta videotron di area publik. Data tersebut juga bisa dilihat melalui www.tpid.banyuwangikab.go.id yang terkoneksi dengan SISKAPERBAPO (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) sebagai sistem informasi harga pangan berbasis web untuk area Jawa Timur yang berisi informasi harga kebutuhan pokok yang diupdate secara harian. Saat ini informasi harga tersebut sudah bisa diakses melalui Aplikasi Smartkampung pada

gadget setiap masyarakat Banyuwangi.

- g. Melakukan analisa sumber dan potensi tekanan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya dan upaya pengendalian inflasi pada bulan berjalan dengan rekomendasi Ketua TPID kepada anggota TPID agar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengendalian inflasi.
- h. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Kegiatan operasi pasar murah akan terus dilaksanakan dengan titik yang semakin diperluas di seluruh wilayah kecamatan di Banyuwangi secara masif.
- b. Evaluasi dalam kegiatan belanja cantik dapat dilakukan dengan menganalisis pergerakan harga bahan pokok sebelum, saat, dan setelah kegiatan, untuk memastikan bahwa peningkatan permintaan akibat belanja massal ASN dan komunitas tidak justru mendorong kenaikan harga, tetapi mampu memperkuat perputaran stok dan menjaga keseimbangan pasokan.
- c. Pemerintah daerah bersama TPID dapat memantau sejauh mana koperasi mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan menjaga ketersediaan pasokan sehingga tidak terjadi kelangkaan yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Evaluasi juga dapat menilai efektivitas kemitraan koperasi dengan Bulog, BUMN, maupun pelaku usaha lainnya dalam menjaga kontinuitas pasokan komoditas strategis.
- d. Pelaksanaan GPM dapat dievaluasi kecukupan dan kesinambungan pasokan agar GPM tidak hanya bersifat insidental, tetapi mampu menekan potensi lonjakan harga di pasar umum. Aspek distribusi dan lokasi kegiatan juga penting untuk dikaji, termasuk tingkat keterjangkauan akses masyarakat serta pemerataan pelaksanaan GPM di berbagai wilayah.
- e. Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan wilayah yang telah menerapkan Warm System secara optimal dengan wilayah yang masih terbatas penerapannya, pemerintah dapat mengukur efektivitas sistem dalam menekan risiko gagal panen dan menjaga pasokan. Evaluasi ini penting agar Warm System tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi benar-benar menjadi dasar pengambilan kebijakan yang mampu menjaga kesinambungan produksi, mencegah gejolak pasokan, dan pada akhirnya memastikan harga pangan tetap stabil serta terjangkau.
- f. Pemerintah dapat melakukan evaluasi mencakup konsistensi harga jual koperasi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan harga pasar, kelancaran pasokan dari mitra strategis seperti Bulog dan Pertamina Patra Niaga, serta kemampuan koperasi dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok tanpa menimbulkan kelangkaan. Selain itu, perlu dievaluasi kinerja manajemen dan tata kelola koperasi, termasuk transparansi keuangan, efektivitas layanan gerai, dan pemanfaatan sistem digital seperti QRIS dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan manfaat ekonomi bagi anggota.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Evaluasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan dan kondisi operasional sarana angkut yang diberikan kepada koperasi, frekuensi serta jangkauan distribusi hasil pertanian, dan dampaknya terhadap kelancaran pasokan komoditas di pasar.
- b. Pemerintah dapat melakukan evaluasi kecukupan dan kesinambungan stok bahan pokok dan elpiji di setiap gerai koperasi, ketepatan pola kemitraan dengan Bulog dan Pertamina Patra Niaga dalam menjamin pasokan, serta kemampuan koperasi dalam merespons lonjakan permintaan masyarakat. Selain itu, dapat dievaluasi kapasitas manajemen dan sistem pencatatan stok agar potensi kekurangan pasokan dapat terdeteksi lebih dini.
- c. Pemerintah daerah dapat memantau kesinambungan serapan hasil panen oleh pasar dan Bulog agar surplus produksi benar-benar terserap dan tidak menimbulkan distorsi harga di tingkat petani.
- d. Pemanfaatan pupuk organik dapat terus disempurnakan sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah dari sisi ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Banyuwangi.
- e. Pemerintah dapat melakukan evaluasi meliputi tingkat kepatuhan peternak terhadap penerapan biosekuriti, cakupan dan efektivitas vaksinasi PMK serta penyakit lainnya, serta respons cepat petugas lapangan dalam mendeteksi dan menangani kasus penyakit ternak.
- f. Pemerintah dapat melakukan evaluasi mencakup capaian produktivitas per hektare dibandingkan target, konsistensi penerapan teknologi dan pendampingan petani, serta efektivitas perluasan luas tanam dalam menjaga kesinambungan produksi.
- g. Pemanfaatan hasil panen sebagai benih merupakan langkah strategis, untuk selanjutnya didukung dengan sistem perbenihan yang terstandar, pendampingan teknis berkelanjutan, serta pengelolaan pascapanen yang optimal agar kualitas dan kontinuitas pasokan tetap terjaga.
- h. Pelaksanaan monitoring langsung ke penggilingan padi serta koordinasi intensif dengan Bulog terbukti memperkuat kepastian stok. Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 97.500 ton siap dimobilisasi jika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemda dapat memastikan semua tahapan normalisasi bendungan direncanakan secara matang dengan koordinasi lintas OPD terkait (Dinas Pertanian, PUPR, BPBD, aparat desa) agar pengerukan, pengawasan, dan distribusi air irigasi berjalan lancar dan tepat sasaran
- b. Mengidentifikasi titik-titik rawan banjir yang paling sering mengalami genangan, sehingga prioritas pengerukan sungai, normalisasi bendungan, dan pengoperasian pintu air dapat diarahkan secara tepat.
- c. Pemda dapat mengevaluasi kapasitas dan kinerja Pelabuhan Ketapang serta pelabuhan alternatif seperti Jangkar, termasuk tingkat pemanfaatan dermaga, buffer zone, dan kesiapan kapal sesuai skenario operasional.
- d. Evaluasi dapat dimulai dengan pemetaan titik-titik rawan luapan Sungai Kedungrejo dan drainase yang sering tersumbat, sehingga prioritas pembersihan dan normalisasi aliran air dapat dilakukan secara tepat sasaran sebelum banjir terjadi.

4. Komunikasi Efektif

- a. Pemda dapat melakukan evaluasi capaian jangkauan dan partisipasi masyarakat di

setiap desa yang dikunjungi. Data ini penting untuk mengetahui apakah seluruh lapisan masyarakat, perangkat desa, dan pelaku UMKM benar-benar terlibat, sehingga informasi dan kebijakan yang disampaikan dapat diterima secara merata.

- b. Pemda dapat meninjau penempatan pos pengamanan dan pos pelayanan di titik strategis untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik berjalan optimal.
- c. Menilai sejauh mana anggota BPD dari seluruh desa berpartisipasi aktif dalam forum, sehingga informasi kebijakan pemerintah dapat diterima secara merata dan aspirasi masyarakat desa tersampaikan dengan baik.
- d. Mengevaluasi apakah pesan kebijakan pengendalian inflasi dari HLM tersampaikan ke masyarakat secara konsisten melalui media, sosialisasi, dan kanal komunikasi resmi, sehingga ekspektasi inflasi dapat dikelola dan masyarakat memahami langkah pemerintah.
- e. Aktivitas pengawasan rutin oleh Petugas Monitoring Harga serta Petugas Perdagangan Antar Daerah/Pulau memberikan data primer yang akurat mengenai alur barang. Pengawasan ini efektif dalam mendeteksi hambatan distribusi secara dini dan mencegah terjadinya spekulasi atau penimbunan barang kebutuhan pokok. Koordinasi antar daerah dan antar pulau memastikan stok pangan di Banyuwangi tetap terjaga, serta meminimalkan risiko disparitas harga antar wilayah di dalam Kabupaten.
- f. Proses analisis sumber dan potensi tekanan inflasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan merupakan bentuk deteksi dini (Early Warning System) yang krusial bagi TPID. Rekomendasi yang diterbitkan oleh Ketua TPID memastikan bahwa setiap anggota TPID bergerak secara sinkron dan tepat sasaran. Evaluasi menunjukkan bahwa langkah-langkah preventif pada bulan berjalan berhasil meredam dampak inflasi dari komoditas yang sebelumnya mengalami anomali harga, sehingga inflasi daerah tetap berada dalam koridor yang terkendali.
- g. Penyusunan kebijakan yang menyelaraskan arahan Nasional dan Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen Banyuwangi dalam menjaga keselarasan indikator makroekonomi. Strategi ini memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat kabupaten tidak kontraproduktif dengan kebijakan pusat. Sinergi ini memperkuat posisi Banyuwangi sebagai daerah pendukung stabilitas pangan regional, sekaligus memastikan bahwa instrumen kebijakan lokal (seperti Operasi Pasar dan GPM) sejalan dengan jadwal intervensi provinsi untuk hasil yang lebih masif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan 4K adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

- a. Operasi pasar perlu terus dilanjutkan secara berkala dengan mengacu pada pemetaan kecamatan penyumbang inflasi tertinggi, sehingga intervensi harga lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan terhadap stabilisasi harga komoditas strategis.
- b. Pelaksanaan Gerakan Belanja Cantik dapat diarahkan secara tematik pada komoditas strategis penyumbang inflasi, seperti beras, gula, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, dan cabai, sehingga aktivitas belanja ASN tidak hanya mendorong omzet pedagang, tetapi juga membantu stabilisasi harga.
- c. Keterlibatan Kopdes dapat dimasukkan dalam skema kerja TPID Kabupaten Banyuwangi, khususnya sebagai mitra distribusi dalam program pangan murah, operasi pasar, dan

- penyaluran komoditas bersubsidi, agar intervensi harga lebih dekat dengan masyarakat
- d. Gerakan Pangan Murah dapat dilaksanakan secara berkala dengan tema komoditas strategis penyumbang inflasi, terutama menjelang HBKN dan periode rawan kenaikan harga, agar dampaknya terhadap stabilitas harga lebih konsisten
 - e. Data real time mengenai rencana tanam, curah hujan, dan debit air dapat dimanfaatkan sebagai early warning system bagi TPID untuk memetakan potensi gangguan pasokan pangan dan melakukan intervensi harga lebih dini.
 - f. Model pengelolaan KKMP Tukangkayu yang telah memiliki gerai sembako, simpan pinjam, dan layanan pendukung dapat didokumentasikan dan direplikasi secara bertahap ke KKMP/KDMP lain, dengan tetap menyesuaikan potensi dan kebutuhan wilayah.

2. Ketersediaan Pasokan

- a. Pemerintah daerah dapat memperluas pemberian sarana distribusi kepada koperasi lain yang mengelola komoditas pangan strategis penyumbang inflasi, sehingga kapasitas logistik daerah meningkat secara merata.
- b. Pemerintah daerah dapat mendorong penerapan sistem pencatatan stok dan distribusi berbasis digital yang terintegrasi. Dengan sistem ini, kondisi pasokan di koperasi dapat dipantau secara real time sehingga potensi kekurangan pasokan dapat diantisipasi lebih dini.
- c. Pemerintah daerah dapat menetapkan target produksi dan buffer stock jagung daerah secara jelas, termasuk skema penyerapan hasil panen oleh Bulog atau offtaker lain, agar surplus produksi dapat dikelola dengan baik dan tidak menekan harga di tingkat petani.
- d. Dapat dilakukan perluasan pendampingan dan demonstrasi plot (demplot) penggunaan pupuk organik di berbagai komoditas pangan utama. Demplot akan meningkatkan kepercayaan petani karena mereka dapat melihat langsung dampaknya terhadap produktivitas dan kualitas hasil panen.
- e. Pemerintah dapat memperkuat sistem pemantauan kesehatan ternak berbasis wilayah, dengan pelaporan cepat dari peternak ke petugas lapangan agar potensi wabah dapat dideteksi dan ditangani sejak dini sebelum berdampak luas pada produksi.
- f. Pemerintah dapat melakukan pendampingan petani melalui Program Agrosolution perlu diperluas dan dilembagakan, sehingga penerapan teknologi pertanian modern tidak hanya berhenti pada demplot, tetapi dapat direplikasi di lebih banyak wilayah sentra padi.
- g. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mendorong percepatan pengembangan kedelai varietas Garuda Merah Putih hingga rencana 60 hektare, serta menjajaki potensi perluasan di wilayah lain yang sesuai untuk meningkatkan dampak terhadap ketersediaan pasokan kedelai.
- h. Pemerintah daerah dapat memperkuat kemitraan dengan penggilingan padi dan distributor agar distribusi beras tetap lancar dan tidak terjadi penahanan stok (holding stock) yang berpotensi memicu kenaikan harga.

3. Kelancaran Distribusi

- a. Pemda dapat mengatur prioritas distribusi air dengan membuat peta irigasi prioritas, sehingga aliran air tetap terjaga ke lahan yang paling produktif, sekaligus melibatkan kelompok tani dalam penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan air.
- b. Melakukan pengecekan berkala terhadap pintu air, bendungan, sungai, dan saluran drainase, serta membersihkan material penghambat aliran air sebelum musim hujan untuk memastikan jalur distribusi tetap lancar.

Menilai kesiapan dermaga, buffer zone, dan armada kapal di Pelabuhan Ketapang

- c. maupun pelabuhan alternatif seperti Jangkar, termasuk efektivitas skenario operasi kapal saat lonjakan arus, untuk memastikan distribusi barang tidak terhambat.
- d. Memetakan lokasi rawan luapan Sungai Kedungrejo dan drainase tersumbat agar prioritas normalisasi aliran air dan pembersihan sungai dilakukan secara tepat sasaran, mencegah gangguan distribusi komoditas perikanan

4. Komunikasi Efektif

- a. Mengumpulkan feedback dari masyarakat mengenai isu harga, pasokan pangan, dan kebutuhan ekonomi agar aspirasi terserap dengan baik dan dapat ditindaklanjuti.
- b. Memantau kelancaran distribusi barang dan jasa serta stabilitas harga selama Nataru untuk memastikan lonjakan mobilitas tidak memicu kelangkaan atau kenaikan harga komoditas pokok.
- c. Memantau ketersediaan barang kebutuhan pokok, distribusi, dan efisiensi anggaran desa untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan mencegah tekanan inflasi lokal.
- d. Menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan mekanisme HLM berikutnya, memperkuat alur komunikasi internal dan eksternal, serta memastikan forum menjadi sarana kolaborasi cepat, tepat, dan efektif dalam pengendalian inflasi daerah.